MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

Penyaluran Subsidi BBM dalam Mendukung Akuntabilitas Belanja Negara Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2021-2024

Meli Sabila[1], Diffa Adelina[2], Devi Nabila Dwiyanti[3]
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
Email: [1]melisabila8@gmail.com, [2]diffaadelina@gmail.com, [3]nabiladwiyanti04@gmail.com

Abstract
This study aims to analyze the implementation of fuel subsidy (BBM) distribution in supporting state expenditure accountability based on the Central Government Budget Realization Report for the 2021-2024 period. This research employed a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the State Budget (APBN), the Central Government Budget Realization Report (LRA), energy subsidy reports, and relevant regulations on public financial management. The analysis was conducted using the effectiveness ratio by comparing budget realization with the allocated budget and interpreting the results descriptively. The findings indicate that the average effectiveness ratio of fuel subsidy distribution reached 104.96%, suggesting that the realization of fuel subsidies slightly exceeded the allocated budget due to changes in energy prices and government subsidy policies. Meanwhile, the average effectiveness ratio of state expenditure reached 100.40%, indicating that state expenditure realization was generally consistent with the planned budget. These findings suggest that the implementation of fuel subsidy distribution in accordance with budget planning supports state expenditure accountability and reflects the government's commitment to accountable public financial management.
Keywords: Fuel Subsidy Distribution, State Expenditure Accountability, Budget Realization Report, State Budget, Effectiveness Ratio.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam mendukung akuntabilitas belanja negara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat periode 2021-2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Pusat, laporan subsidi energi, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi terhadap anggaran, kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan penyaluran subsidi BBM dan akuntabilitas belanja negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas penyaluran subsidi BBM selama periode penelitian sebesar 104,96%, yang menunjukkan bahwa realisasi subsidi BBM secara umum sedikit melebihi anggaran yang ditetapkan akibat dinamika harga energi dan kebijakan subsidi pemerintah. Sementara itu, rata-rata rasio efektivitas belanja negara sebesar 100,40%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja negara relatif sesuai dengan

Article history
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

anggaran yang telah ditetapkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran subsidi BBM yang dikelola sesuai dengan perencanaan anggaran dapat mendukung akuntabilitas belanja negara serta memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan subsidi dalam pengelolaan APBN.
Kata Kunci: ***Penyaluran Subsidi BBM***, ***Akuntabilitas Belanja Negara***, ***Laporan Realisasi Anggaran***, ***APBN***, ***Rasio Efektivitas***.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Salah satu komponen dalam belanja negara yang memiliki alokasi besar dan menjadi sorotan publik adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi BBM berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi, melindungi daya beli masyarakat, serta menjadi penopang pada aktivitas ekonomi negara [1]. Namun, pada penerapannya masih belum maksimal, seperti ketidakakuratan dalam menentukan sasaran penerima subsidi, kekhawatiran besar dalam penyesuaian anggaran, serta tanggapan negatif terkait penyaluran data mengenai sistem penyaluran subsidi masyarakat.

Dalam periode tahun 2021 hingga tahun 2024, pemerintah telah menghadapi berbagai tantangan perekonomian yang mempengaruhi kebijakan subsidi energi, meliputi pasca pandemi COVID-19, pergerakan harga minyak dunia, dan perkembangan kebijakan energi nasional [2]. Pada kondisi ini mengakibatkan anggaran subsidi BBM mengalami penyesuaian substansial dari tahun ke tahun. Selain itu, perbedaan antara dana subsidi yang telah direncanakan dengan jumlah subsidi yang direalisasikan pada berbagai masa penganggaran. Fenomena ini menimbulkan minat masyarakat terhadap efektivitas penyaluran subsidi serta keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi seputar manajemen belanja subsidi. Dengan ini, penyaluran subsidi BBM menjadi krusial dalam menjamin setiap penggunaan dana negara dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan melalui catatan keuangan negara.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan metode bagi pemerintah untuk melaporkan penggunaan APBN, dengan menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan yang telah direalisasikan jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Melalui LRA, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan serta melaksanakan program dan menggunakan dana negara, termasuk untuk biaya pengeluaran subsidi bahan bakar minyak.

Selain keterbukaan informasi, kejelasan dalam penyaluran subsidi BBM juga dapat dinilai dari kesamaan antara dana subsidi yang sudah dialokasikan dan pelaksanaan subsidi yang diberikan pemerintah. Kesesuaian tersebut menunjukkan sejauh mana realisasi subsidi BBM dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Disisi lain pertanggungjawaban pengeluaran negara dapat dilihat dari kesamaan antara pengeluaran yang terlaksana dan dana serta kewajiban pemerintah dalam catatan keuangan negara. Maka dari itu, penelaahan terhadap kesamaan antara dana dan pelaksanaan menjadi penting untukmengukur kejelasan serta kewajiban dalam pengelolaan subsidi BBM.

Penelitian sebelumnya banyak membahas isu keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, penyaluran untuk APBN, pengelolaan anggaran, serta efektivitas

kebijakan subsidi energi. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan sangat memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pengawasan oleh publik, membangun keyakinan masyarakat, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara [1]. Namun studi yang membahas secara spesifik terkait keterbukaan distribusi subsidi bahan bakar minyak berdasarkan dokumen APBN dalam data laporan LRA pemerintah pusat masih sangat terbatas.

Dalam penelitian ini berfokus pada ketersediaan informasi anggaran subsidi bahan bakar minyak, kesesuaian antara anggaran dan realisasi subsidi, serta pertanggungjawaban atas pengeluaran subsidi dalam LRA masih jarang ditemukan [1]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesempatan untuk penelitian ini dalam memberikan informasi mendalam tentang keterbukaan distribusi subsidi bahan bakar minyak dan tanggungjawab pengeluaran negara pada masa kini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis penyaluran subsidi BBM dan akuntabilitas belanja negara pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat untuk periode waktu tahun 2021 hingga tahun 2024. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari dokumen APBN, pada Laporan Realisasi Anggaran dengan mengkaji ikhtisar umber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan[3].

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tingkat transparannsi penyaluran subsidi BBM dan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang menjadi ladasan dalam menyebarkan dan memperbaiki kualitas pengelolaan subsidi enegeri agar menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel[4].

2. Tinjauan Pustaka

Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* merupakan pelaksanaan fungsi politik, ekonomi, dan administrasi negara yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan negara, penerapan *good governance* menjadi landasan penting untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Salah satu bentuk implementasi *good governance* dalam pengelolaan APBN adalah melalui penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi BBM merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas harga energi, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung kegiatan perekonomian nasional. Sebagai salah satu komponen belanja negara dengan nilai anggaran yang besar, penyaluran subsidi BBM memerlukan pengelolaan yang tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tujuan kebijakan subsidi dapat tercapai secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran subsidi BBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, volume konsumsi BBM bersubsidi, serta kebijakan fiskal pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi subsidi BBM pada setiap tahun anggaran dapat mengalami perubahan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran subsidi BBM menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan subsidi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemerintah.

Selain penyaluran subsidi BBM, akuntabilitas belanja negara juga merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas merupakan kewajiban

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas tercermin melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran berfungsi sebagai alat evaluasi pelaksanaan APBN sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan keuangan negara[5].

Dengan demikian, penyaluran subsidi BBM dan akuntabilitas belanja negara memiliki keterkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan penyaluran subsidi BBM yang sesuai dengan perencanaan anggaran serta didukung oleh penyajian informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi sekaligus menunjukkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskriptif[6]digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyaluran subsidi BBM serta akuntabilitas belanja negara berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat periode 2021–2024. Analisis dilakukan menggunakan data numerik yang bersumber dari dokumen APBN dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Pusat, dokumen APBN, laporan subsidi energi, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi tertentu, melainkan berfokus pada pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat Republik Indonesia selama periode 2021–2024.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2021–2024, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), laporan subsidi energi pemerintah, jurnal ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data anggaran dan realisasi subsidi BBM serta belanja negara, sedangkan studi pustaka digunakan untuk memperoleh landasan teori yang mendukung penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Penyaluran Subsidi BBM (X)**, yang dianalisis berdasarkan kesesuaian antara anggaran subsidi BBM dan realisasi subsidi BBM yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.
2. **Akuntabilitas Belanja Negara (Y)**, yang dianalisis berdasarkan kesesuaian antara anggaran belanja negara dan realisasi belanja negara yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

Teknik Analisis Data

Dengan membandingkan data anggaran dan realisasi subsidi BBM serta anggaran dan realisasi belanja negara yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Pusat periode 2021–2024. Perbandingan tersebut digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan penyaluran subsidi BBM dan akuntabilitas belanja negara berdasarkan kesesuaian antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

1. Penyaluran Subsidi BBM

Pelaksanaan penyaluran subsidi BBM dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu dengan membandingkan realisasi subsidi BBM terhadap anggaran subsidi BBM yang telah ditetapkan dalam APBN.

Perhitungan Rasio Efektivitas[7]:

Tingkat Kesesuaian Penyaluran Subsidi BBM=
(**Realisasi Subsidi BBM/Anggaran Subsidi BBM) × 100%**

Perhitungan ini mengacu pada konsep rasio efektivitas yang membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan anggaran. Semakin mendekati 100%, menunjukkan bahwa realisasi subsidi BBM semakin sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nilai di atas 100% menunjukkan realisasi melebihi anggaran, sedangkan nilai di bawah 100% menunjukkan realisasi lebih rendah dari anggaran.

2. Akuntabilitas Belanja Negara

Akuntabilitas belanja negara dianalisis menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi belanja negara terhadap anggaran belanja negara yang telah ditetapkan.

Perhitungan Rasio Efektivitas[8]:

Tingkat Kesesuaian Belanja Negara=
(Realisasi Belanja Negara/Anggaran Belanja Negara) × 100%

Perhitungan tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan belanja negara dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Semakin mendekati 100%, menunjukkan bahwa realisasi belanja negara semakin sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Analisis Deskriptif

Hasil perhitungan rasio efektivitas selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyaluran subsidi BBM dan akuntabilitas belanja negara selama periode penelitian tahun 2021–2024. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel.

4. Hasil dan Pembahasan

Penyaluran Subsidi BBM

Tabel 1 Penyaluran Subsidi BBM

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

TAHUN	ANNGARAN SUBSIDI BBM	REALISASI SUBSIDI BBM	RASIO KESESUIAN
2021	Rp 175.350.382.161.000	Rp 242.086.818.340.688	138,06%
2022	Rp 283.660.951.606.000	Rp 252.812.907.867.326	89,13%
2023	Rp 298.497.119.385.000	Rp 269.592.086.053.747	90,32%
2024	Rp 285.971.979.124.000	Rp 292.692.594.096.846	102,35%

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efektivitas pada penyaluran subsidi BBM selama periode 2021–2024 mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 138,06% pada tahun 2021, 89,13%[9], pada tahun 2022, 90,32%[10], pada tahun 2023 90,32% [11], dan 102,35% pada tahun 2024 [12]. Secara keseluruhan, rata-rata penyaluran subsidi BBM mencapai 104,96%, yang menunjukkan bahwa realisasi subsidi BBM cenderung sedikit melebihi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran subsidi BBM dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, harga energi, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Akuntabilitas Belanja Negara

Tabel 2 Akuntabilitas Belanja Negara

TAHUN	ANGARAN BELANJA NEGARA	REALISASI BELANJA NEGARA	RASIO KESESUIAN
2021	Rp 2.750.028.018.431.000	Rp 2.786.411.359.562.810	101,32%
2022	Rp 3.106.425.255.592.000	Rp 3.096.262.719.102.670	99,67%
2023	Rp 3.117.176.344.456.000	Rp 3.121.217.245.707.610	100,13%
2024	Rp 3.343.494.321.894.000	Rp 3.359.766.708.068.240	100,49%

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio akuntabilitas belanja negara selama periode 2021–2024 masing-masing sebesar 101,32%, 99,67%, 100,13%, dan 100,49%. Secara keseluruhan, rata-rata rasio akuntabilitas mencapai 100,40%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja negara relatif sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil tersebut mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja negara serta menunjukkan bahwa pengelolaan APBN telah dilaksanakan secara akuntabel.

Penyaluran Subsidi BBM terhadap Akuntabilitas Belanja Negara

Tabel 3. Hasil Penyaluran Subsidi BBM terhadap Akuntabilitas Belanja Negara

TAHUN	RASIO TRANSPARANSI SUBSIDI BBM	RASIO AKUNTABILITAS BELANJA NEGARA
2021	138,06%	101,32%
2022	89,13%	99,67%
2023	90,32%	100,13%
2024	102,35%	100,49%
RATA-RATA	104,96%	100,40%

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan, penyaluran subsidi BBM dan akuntabilitas belanja negara, diperoleh rata-rata untuk penyaluran subsidi BBM sebesar 104,96% dan rata-rata akuntabilitas

sebesar 100,40%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi subsidi BBM mengalami fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja negara secara keseluruhan.

Fluktuasi pada realisasi subsidi BBM menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan harga energi. Namun demikian, meskipun terjadi perubahan pada realisasi subsidi BBM, akuntabilitas belanja negara tetap berada pada tingkat yang stabil dan mendekati anggaran yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran subsidi BBM memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas belanja negara. Keterbukaan informasi mengenai anggaran dan realisasi subsidi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik serta meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan APBN. Dengan demikian, penyaluran dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

5.Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran subsidi BBM dalam mendukung akuntabilitas belanja negara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat periode 2021–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas penyaluran subsidi BBM mengalami fluktuasi setiap tahun dengan rata-rata sebesar 104,96%, yang menunjukkan bahwa realisasi subsidi BBM secara umum sedikit melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga energi, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah dalam penyesuaian subsidi.

Sementara itu, akuntabilitas belanja negara menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 100,40%, yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja negara secara umum telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya konsistensi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBN.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran subsidi BBM yang dikelola sesuai dengan perencanaan anggaran dapat mendukung akuntabilitas belanja negara. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan subsidi BBM melalui perencanaan anggaran yang lebih akurat serta pengelolaan subsidi yang tepat sasaran agar akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. Nulailah and S. Syamsul, “Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya?,” *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, vol. 7, no. 2, pp. 180–195, Oct. 2021, doi: 10.31289/jab.v7i2.5388.

[2] Fika Nurul Ulya, “OJK: Perusahaan Terbuka Kini Wajib Melantai di Bursa Efek ,” Kompas.com.

[3] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.”

[4] CSIS Indonesia, “LAPORAN REFORMASI SUBSIDI ENERGI,” 2024.

[5] MBA. , A. C. Prof Dr.Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Sektor Publik, 2018.

[6] Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*, 19th ed. Bandung: ALFABEYA,CV., 2019.

[7] A. B. Febriana and M. Narastri, “ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) UNTUK MENILAI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya),” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 3, pp. 160–173, Jul. 2023, doi: 10.59059/maslahah.v1i3.
[8] E. Aprilia Putrinata and Y. Army Nurcahya, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Tingkat Sub Kegiatan di Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2025,” *Maret*, vol. 02, no. 3, pp. 507–511, Mar. 2026, [Online]. Available: https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp
[9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “LKPP Financial Report of Central Government of 2021 (AUDITED),” 2022.
[10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “LKPP Financial Report of Central Government of 2022 (AUDITED),” 2023.
[11] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “LKPP Financial Report of Central Government 2023 (AUDITED),” 2024.
[12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “LKPP Financial Report Of The Central Government 2024 (AUDITED),” 2025.